

INFORMASI INDIKATOR KINERJA
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
TAHUN 2023

PENGANTAR

Informasi Indikator Kinerja (IIK) / manual IKU Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disusun dalam rangka mempermudah pada saat pengukuran indikator kinerja. IIK ini antara lain memuat daftar indikator kinerja, sasaran kinerja, deskripsi indikator kinerja, formula perhitungan, jenis aspek target, status data, jenis perhitungan data, metode cascading, penanggungjawab data, sumber data, dan periode pelaporan.

Dokumen IIK ini selanjutnya menjadi semacam panduan resmi pada saat pengukuran kinerja, rekon kinerja dan audit kinerja. Harapannya semua pihak terkait dapat mempedomani dokumen ini sebaik-baiknya. Dokumen IIK ini tentu tidak terlepas dari kekurangan, oleh karenanya dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Bitung, 24 Januari 2022



Harlyo Raya Maharbhakti, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

INDIKATOR KINERJA 1 : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan.....	6
IKU 2: Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan	7
INDIKATOR KINERJA 3 : Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%).....	18
INDIKATOR KINERJA 4 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks).....	20
INDIKATOR KINERJA 5 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks).....	24
INDIKATOR KINERJA 6 Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP	27
INDIKATOR KINERJA 7 Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)	30
INDIKATOR KINERJA 8 Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	34
INDIKATOR KINERJA 9 Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)..	38
INDIKATOR KINERJA 10 Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%) .	42
INDIKATOR KINERJA 11 Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	47
INDIKATOR KINERJA 12 Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	49

INDIKATOR KINERJA 13 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	51
INDIKATOR KINERJA 14 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Penangkapan Ikan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	53
INDIKATOR KINERJA 15 Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung (nilai).....	55
INDIKATOR KINERJA 16 Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	57
INDIKATOR KINERJA 17 Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	60
INDIKATOR KINERJA 18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	63
INDIKATOR KINERJA 19 Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit).....	65
INDIKATOR KINERJA 20 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%).....	67
INDIKATOR KINERJA 21 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%).....	69
INDIKATOR KINERJA 22 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	71
INDIKATOR KINERJA 23 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%).....	73
INDIKATOR KINERJA 24 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	75

INDIKATOR KINERJA 25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung77

INDIKATOR KINERJA 1 : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan

IKU 2: Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan

INFORMASI INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1 SASARAN STRATEGIS	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan
2 DEFINISI	<p>1) Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Usaha perikanan meliputi subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan;</p> <p>2) Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan teknis dan laporan pelaku usaha.</p>
3 FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	<p>Perhitungan persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan dirumuskan sebagai berikut:</p> $Xp = \frac{(Xkp + Xbd + Xolh + Xdst)}{n}$ <p>Keterangan:</p> <p>Xp = Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)</p> <p>Xkp = Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan(%)</p> <p>Xbd = Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan (%)</p> <p>$Xolh$ = Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan hasil perikanan (%)</p> <p>$Xdst$ = Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan (%)</p> <p>n = Jumlah Pelaku Usaha yang diperiksa</p> <p>Penjelasan detail:</p>

A. Pemeriksaan Kepatuhan subsektor penangkapan ikan

- 1) Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan yaitu upaya pengawasan KBLI subsektor penangkapan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis;
- 2) Pengawasan subsektor penangkapan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan;
Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada subsektor penangkapan ikan dilakukan :
 - 03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut;
 - 03112 - Penangkapan Crustacea di Laut;
 - 03113 - Penangkapan Mollusca di Laut;
 - 03115 - Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut;
 - 03116 - Penangkapan Echinodermata di Laut;
 - 03117 - Penangkapan Coelenterata di Laut;
 - 03118 - Penangkapan Ikan Hias Laut;
 - 03119 - Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut;
 - 03121 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat;
 - 03122 - Penangkapan Crustacea di Perairan Darat;
 - 03123 - Penangkapan Mollusca di Perairan Darat;
 - 03124 - Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat;
 - 03125 - Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat;
 - 03126 - Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat; dan
 - 03127 - Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat.
- 3) Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI penangkapan ikan sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi Pengawas Perikanan dilengkapi seragam dinas Pengawas Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;
 - b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha;
 - c. Pemeriksaan teknis sesuai Perdirjen 6 Tahun 2021 meliputi:
 - 1) Pemenuhan persyaratan umum usaha
 - 2) Pemenuhan persyaratan khusus usaha
 - 3) Pemenuhan sarana
 - 4) Kesesuaian struktur organisasi dan SDM
 - 5) Pemenuhan pelayanan
 - 6) Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa

- 7) Pemenuhan sistem manajemen usaha
 d. Melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui sistem pelaporan Dit. PPSDP.

- Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor penangkapan ikan, sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran 1) - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Formula perhitungan pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan

$$X_{bd} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- X_{bd} = Persentase penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor penangkapan ikan (%)
 X = Hasil pemeriksaan KBLI subsektor penangkapan ikan sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai)
 n = Jumlah KBLI subsektor penangkapan ikan yang **diperiksa** di wilayah UPT (unit)

B. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pembudidayaan Ikan

- 1) Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan yaitu upaya pengawasan KBLI subsektor pembudidayaan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis;

- 2) Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan;
- 3) Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada subsektor pembudidayaan ikan dilakukan terhadap:
 - 03211 - Pembesaran ikan/pisces bersirip di laut;
 - 03215 - Pembesaran Mollusca Laut;
 - 03216 - Pembesaran Crustacea Laut;
 - 03217 - Pembesaran Tumbuhan Air Laut;
 - 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam;
 - 03222 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung;
 - 03223 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba;
 - 03224 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah;
 - 03227 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap;
 - 03251 - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau;
 - 03253 - Pembesaran Mollusca Air Payau;
 - 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau;
 - 03255 - Pembesaran Tumbuhan Air Payau;
 - 03212 - Pembenihan Ikan Laut;
 - 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar;
 - 03252 - Pembenihan Ikan Air Payau;
 - 03213 - Budidaya Ikan Hias Air Laut;
 - 03214 - Budidaya Karang (Coral);
 - 03219 - Budidaya Biota Air Laut Lainnya;
 - 03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar;
 - 03229 - Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya;
 - 03259 - Budidaya Biota Air Payau Lainnya;
 - 03231 - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut;
 - 03232 - Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut;
 - 03241 - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar;
 - 03242 - Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar;
 - 03261 - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau;
 - 03262 - Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau.
 - 03233 - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut;
 - 03243 - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar;

03263 - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau.

- 4) Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI pembudidayaan ikan sebagai berikut:
- a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi Pengawas Perikanan dilengkapi seragam dinas Pengawas Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;
 - b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha;
 - c. Pemeriksaan teknis sesuai Perdirjen 6 Tahun 2021 meliputi:
 - 1) Pemenuhan persyaratan umum usaha
 - 2) Pemenuhan persyaratan khusus usaha
 - 3) Pemenuhan sarana
 - 4) Kesesuaian struktur organisasi dan SDM
 - 5) Pemenuhan pelayanan
 - 6) Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa
 - 7) Pemenuhan sistem manajemen usaha
 - d. Melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui sistem pelaporan Dit. PPSDP.
- Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pembudidayaan ikan, sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran 1) - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Formula perhitungan pemeriksaan kepatuhan subsektor bidang pembudidayaan ikan

$$X_{bd} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- X_{bd} = Persentase penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pembudidayaan ikan (%)
- X = Hasil pemeriksaan KBLI subsektor pembudidayaan ikan sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai)
- n = Jumlah KBLI subsektor pembudidayaan ikan yang **diperiksa** di wilayah UPT (unit)

C. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengolahan Ikan

- 1) Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan yaitu upaya pengawasan KBLI subsektor pengolahan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis;
- 2) Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan;
- 3) Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada subsektor pengolahan ikan dilakukan terhadap:
 - 03133 - Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut
 - 03143 - Jasa Pasca Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat
 - 10211 - Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
 - 10212 - Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan;
 - 10213 - Industri Pembekuan Ikan;
 - 10214 - Industri Pemandangan Ikan;
 - 10215 – Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
 - 10216 - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi;
 - 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
 - 10219 - Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan;
 - 10221 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng;
 - 10222 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng;
 - 10291 - Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air lainnya;
 - 10292 - Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air lainnya;
 - 10293 - Industri Pembekuan Biota Air lainnya;

- 10294 - Industri Pemindangan Biota Air lainnya;
- 10295 - Industri Peragian/Fermentasi Biota Air lainnya;
- 10296 - Industri Berbasis Lumutan Biota Air lainnya;
- 10297 - Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air lainnya;
- 10298 - Industri Pengolahan Rumput Laut;
- 10299 - Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Biota Air lainnya;
- 10414 - Industri Minyak Ikan;
- 10779 - Industri Produk Masak lainnya;
- 10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya;
- 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan;
- 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan;
- 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan;
- 47245 - Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan;
- 47753 - Perdagangan Eceran Ikan Hias;
- 47754 - Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan;

- 4) Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengolahan ikan sebagai berikut:
- a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi Pengawas Perikanan dilengkapi seragam dinas Pengawas Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;
 - b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha;
 - c. Pemeriksaan teknis sesuai Perdirjen 6 Tahun 2021 meliputi:
 - 1) Pemenuhan persyaratan umum usaha
 - 2) Pemenuhan persyaratan khusus usaha
 - 3) Pemenuhan sarana
 - 4) Kesesuaian struktur organisasi dan SDM
 - 5) Pemenuhan pelayanan
 - 6) Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa
 - 7) Pemenuhan sistem manajemen usaha
 - d. Melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui sistem pelaporan Dit. PPSDP.

- Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengolahan ikan, sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
----	---------------------	-------	--------

1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran 1) - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSPD)
Jumlah Nilai		1	

Formula perhitungan pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan

$$X_{bd} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- X_{bd} = Persentase penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengolahan ikan (%)
- X = Hasil pemeriksaan KBLI subsektor pengolahan ikan sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai)
- n = Jumlah KBLI subsektor pengolahan ikan yang **diperiksa** di wilayah UPT (unit)

D. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

- 1) Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan yaitu upaya pengawasan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis;
- 2) Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan;
- 3) Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada subsektor

pengolahan ikan dilakukan terhadap:

03126 - Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat;

03127 - Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat;

50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus;

50142 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus;

50222 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus;

46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan;

46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan;

47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan;

47245 - Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan;

47753 - Perdagangan Eceran Ikan Hias;

47754 - Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan;

4) Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan sebagai berikut:

a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi Pengawas Perikanan dilengkapi seragam dinas Pengawas Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;

b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha;

c. Pemeriksaan teknis sesuai Perdirjen 6 Tahun 2021 meliputi:

1) Pemenuhan persyaratan umum usaha

2) Pemenuhan persyaratan khusus usaha

3) Pemenuhan sarana

4) Kesesuaian struktur organisasi dan SDM

5) Pemenuhan pelayanan

6) Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa

7) Pemenuhan sistem manajemen usaha

d. Melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui sistem pelaporan Dit. PPSDP.

- Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan, sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
----	---------------------	-------	--------

1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran 1) - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Formula perhitungan pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan:

$$X_{bd} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- X_{bd} = Persentase penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan (%)
- X = Hasil pemeriksaan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai)
- n = Jumlah KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan yang **diperiksa** di wilayah UPT (unit)

4. SATUAN INDIKATOR	:	% (Persen)			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input checked="" type="checkbox"/> Lead Process	<input type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung			
8. SUMBER DATA	:	Pangkalan PSDKP Bitung, Satwas dan Wilker PSDKP Bitung			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3 : Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)

1. SASARAN KEGIATAN

Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif

2. INDIKATOR KINERJA

Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA

- IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP
- Salah satu tools yang digunakan adalah "form keaktifan POKMASWAS" yang disiapkan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan didistribusikan ke setiap UPT
- Pembinaan terhadap POKMASWAS dapat dilakukan setiap bulan atau menyesuaikan rencana aksi masing-masing UPT
- UPT wajib melakukan pembinaan terhadap POKMASWAS. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada "Form Keaktifan POKMASWAS".
- Setiap Pokmaswas yang dianggap aktif bilamana telah melaporkan kegiatan pembinaan dengan melampirkan Form Pembinaan yang dilengkapi dengan dokumentasi dapat berupa foto/video.
- Pengukuran IKU ini dilakukan pada periode triwulan IV 2022.

Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$X = \frac{a}{b} \times 100\%$$

X = *Persentase Pokmaswas yang aktif untuk mendukung Pengawasan SDKP*

a = Jumlah Pokmaswas yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP berdasarkan laporan dari UPT / DKP Provinsi

b = Jumlah target Pokmaswas aktif dalam mendukung pengawasan

SDKP yang telah di distribusikan di setiap UPT / DKP
Provinsi

Catatan :

Masing-masing Pokmaswas dapat melaksanakan lebih dari satu kegiatan yang diukur sebagai keaktifan Pokmaswas.

Form Pembinaan Pokmaswas sebagai berikut.

No	Kab/Kota	Kecamatan/Kel/Desa	Nama Pokmaswas	Nama, Ketua, & No. HP	Jumlah Anggota	Tahun Pembentukan	Penetapan Pembentukan (No.SK & Tgl Pembentukan)	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Koordinat lokasi (Long,Lat)	Sarana dan Prasarana Pokmaswas			
										Nama Barang	Tahun Perolehan	Sumber Dana	Aktif/ Tidak Aktif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

4. SATUAN INDIKATOR

% (persen)

5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP

Kuantitas/ Output Kualitas/ Mutu Waktu Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS

Lead Input Lead Process Lag Output Lag Outcome

7. UNIT KERJA / PJ

Pangkalan PSDKP Bitung

8. SUMBER DATA

Laporan pembinaan POKMASWAS

9. STATUS DATA

Raw Data Hasil Perhitungan Raw Data

10. JENIS PERHITUNGAN DATA

Akumulasi Rata-rata Nilai Posisi Akhir

11. METODE CASCADING

Adopsi Langsung Lingkup Dipersempit Komponen Pembentuk Non Direct/Buat Baru

12. POLARISASI

Maximize Minimize Stabilize

13. PERIODE

Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

PELAPORAN

INDIKATOR KINERJA 4 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

2. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;
 - Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;
 - Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
 1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
 2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
 3. Persentase Capaian Hari Operasi;
 4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
 5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
 6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
 7. Jumlah Pemutusan/pengangkatan Rumpon Ilegal;
 8. Jumlah kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, Internasional dan dukungan Kegiatan Sosial/SAR.
 9. Jumlah pengawasan di kawasan konservasi, destructive fishing dan pelanggaran kelautan lainnya
-

4. FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN :

Untuk mengukur Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^9 f_i$$

Keterangan:

- i_{kp} = indeks kinerja Kapal Pengawas
 n = jumlah indeks kinerja
 i = indeks kinerja
 f_i = faktor penghitung

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Kapal Pengawas;

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa (Bobot 20%) menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi kapal yang diperiksa}}{\text{jumlah target kapal yang akan diperiksa}} \times 100 \times 20\%$$

2. Persentase Coverage Area Pengawasan (Bobot 15%) menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi coverage area}}{\text{target coverage area}} \times 100 \times 15\%$$

3. Persentase Capaian Hari Operasi (Bobot 15%) menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi hari operasi}}{\text{target hari operasi}} \times 100 \times 15\%$$

4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan (Bobot 10%) menggunakan rumus:

$$\frac{\text{jumlah target operasi yang ditindaklanjuti}}{\text{total target operasi yang diberikan}} \times 100 \times 10\%$$

5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing (Bobot 10%) menggunakan rumus:
-

$$\frac{\text{jumlah tangkapan kapal per kapal pengawas}}{\text{jumlah tangkapan kapal keseluruhan}} \times 100 \times 10\%$$

6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (Bobot 10%) menggunakan rumus:

$$\frac{\text{jumlah alat tangkap yang disita per kapal pengawas}}{\text{jumlah alat tangkap yang disita keseluruhan}} \times 100 \times 10\%$$

7. Jumlah Pemutusan/pengangkatan Rumpon Ilegal (Bobot 10%) menggunakan rumus:

$$\frac{\text{jumlah rumpon ilegal yang diputus per kapal pengawas}}{\text{jumlah rumpon ilegal yang diputus keseluruhan}} \times 100 \times 10\%$$

8. Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, Internasional dan dukungan Kegiatan Sosial/SAR (Bobot 5%) menggunakan rumus:

$$\frac{\text{jumlah misi dukungan kegiatan yang diselesaikan}}{\text{jumlah misi dukungan kegiatan yang diberikan}} \times 100 \times 5\%$$

9. Jumlah pengawasan di kawasan konservasi, destructive fishing dan pelanggaran kelautan lainnya (Bobot 5%) menggunakan rumus:

$$\frac{\text{jumlah kawasan konservasi yang telah diawasi}}{\text{jumlah target kawasan konservasi yang akan diawasi}} \times 100 \times 5\%$$

Kategori Penilaian Kinerja

Interval	Nilai Kinerja
0 – 50	Tidak Baik
50 – 75	Kurang Baik
75 – 90	Baik
90 – 100	Sangat Baik

1.

5. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks (1-100)			
6. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
7. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Outcome
8. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung, Subkoordinator Sarana dan Prasarana			
9. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Operasi Kapal Pengawas Tahun 2022			
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

2. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;
- Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;
- Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
 1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
 2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
 3. Persentase Capaian Hari Operasi;
 4. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
 5. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;

Untuk mengukur Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat Pengawas* menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$i_{sb} = \sum_{i=1}^5 f_i$$

4. FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN :

Keterangan:

i_{sb} = indeks kinerja *Speed Boat Pengawas*

n = jumlah indeks kinerja

i = indeks kinerja

f_i = faktor penghitung

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas;

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa (Bobot 25%) menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi kapal yang diperiksa}}{\text{jumlah target kapal yang akan diperiksa}} \times 100 \times 25\%$$

2. Persentase Coverage Area Pengawasan (Bobot 25%) menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi coverage area}}{\text{target coverage area}} \times 100 \times 25\%$$

3. Persentase Capaian Hari Operasi (Bobot 25%) menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi hari operasi}}{\text{target hari operasi}} \times 100 \times 25\%$$

4. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing (Bobot 15%) menggunakan rumus:

$$\frac{\text{jumlah tangkapan kapal per kapal pengawas}}{\text{jumlah tangkapan kapal keseluruhan}} \times 100 \times 15\%$$

5. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (Bobot 10%) menggunakan rumus:

$$\frac{\text{jumlah alat tangkap yang disita per kapal pengawas}}{\text{jumlah alat tangkap yang disita keseluruhan}} \times 100 \times 10\%$$

Kategori Penilaian Kinerja

Interval	Nilai Kinerja
0 – 50	Tidak Baik
50 – 75	Kurang Baik
75 – 90	Baik
90 – 100	Sangat Baik

5. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks (1-100)			
6. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
7. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Outcome
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada			
9. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Ditjen. PSDKP Tahun 2021			
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data		<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6 Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

2. INDIKATOR KINERJA : **Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP
- Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel
- Logistik kapal terdiri dari :
 - a. Bahan Bakar Minyak (BBM) , dan
 - b. Pelumas
- Logistik Personel terdiri dari :
 - a. Bahan Makanan
 - b. Air Tawar, dan
 - c. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin)

Dalam hal terjadi kerusakan kapal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan operasi pengawasan maka, target dianggap tercapai (100%).

4. FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN :

$$i_{dat} = \sum_{i=1}^n f_i$$

Keterangan:

i_{dat} = Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP

n = Jumlah indeks kinerja

i = indeks Pemenuhan

f_i = faktor penghitung

Daftar Faktor Penghitung Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%);
2. Pelumas (20%);
3. Bahan Makanan (30%);
4. Air Tawar (15%);
5. Alat-alat Pelayanan (5%)

Kriteria Penilaian

1. **Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%);**
Pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan Operasi Pengawasan SDKP (triwulan)
Perhitungan: $(4/4) \times 30\%$
2. **Pelumas (20%);**
Pemenuhan kebutuhan Pelumas untuk kebutuhan permesin Kapal Pengawas dalam menunjang pengawasan SDKP (semester)
Perhitungan: $(2/2) \times 20\%$
3. **Bahan Makanan (30%);**
Pemenuhan kebutuhan bahan makanan bagi awak kapal Pengawas (bulanan)
Perhitungan: $(12/12) \times 30\%$
4. **Air Tawar (15%);**
Pemenuhan kebutuhan air tawar untuk keperluan sehari - hari AKP di atas kapal (bulanan)
Perhitungan : $(12/12) \times 15\%$
5. **Alat – Alat Pelayanan (5%)**
Pemenuhan kebutuhan alat – alat pelayanan guna menunjang kegiatan operasional kapal (semester)
Perhitungan: $(2/2) \times 5\%$

Kategori Penilaian Pemenuhan Logistik

No	Nilai Interval Indeks Pemenuhan Logistik	Score	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP
1	0 - 25	D	Tidak Terpenuhi
2	26 - 50	C	Kurang Terpenuhi
3	51 - 75	B	Terpenuhi
4	76 - 100	A	Sangat Terpenuhi

5. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks (1-100)			
6. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
7. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Outcome
8. UNIT KERJA / PJ	:	Kepala Pangkalan PSDKP Bitung			
9. SUMBER DATA	:	Dokumen atau laporan pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas			
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7 Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

2. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh UPT PSDKP Bitung.
- Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 16 (enam belas) unit (*Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat*).
- Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari : perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*).
- Prasarana Pengawasan SDKP meliputi: Prasarana Pengawasan Utama (lahan, pos pengawasan/kantor, bangunan operator, rumah penampungan sementara, gudang, tempat penyimpanan benda sitaan negara, gedung serba guna, dermaga) dan Prasarana Pengawasan pendukung (gedung ibadah, garasi speedboat, rumah genset, penampungan air bersih, jalan lingkungan, pos jaga, lapangan upacara, lapangan olah raga, tempat parkir, pagar lingkungan, taman, drainase).
- Perawatan Prasarana Pengawasan SDKP terdiri dari :

Rehabilitasi	Dilakukan dengan cara memperbaiki prasarana pengawasan yang telah rusak sebagian, dengan mempertahankan fungsi, arsitektur dan struktur bangunan seperti semula, sedangkan utilitas dapat berubah.
Renovasi	Dilakukan dengan cara memperbaiki prasarana pengawasan yang telah rusak sebagian, dimana fungsi, arsitektur, struktur bangunan, dan utilitas dapat berubah.

Restorasi	Dilakukan dengan cara memperbaiki prasarana pengawasan yang telah rusak sebagian, dengan mempertahankan arsitektur, sedangkan fungsi, struktur bangunan, dan utilitas dapat berubah.
-----------	--

- Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%.
- IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana Pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

No	NAMA	LOKASI
Kapal Pengawas		
1	KP. Hiu 02	Bitung
2	KP. Hiu 05	Bitung
Speed Boat		
1	Albacore 001	Bitung
2	Napoleon 030	Makassar
3	Napoleon 031	Gorontalo
4	Napoleon 056	Mamuju
5	Dolphin 019	Kendari
6	Dolphin 026	Gorontalo Utara
7	Dolphin 003	Bangkeplut
8	Sea Rider 06	Bitung
9	RB. Selayar	Selayar
10	RB. Pangkajene Kep.	Pangkajene Kep.
11	RB. Bone	Bone
12	RB. Takalar	Takalar

13	RB. Kendari	Kendari
14	RB. Wakatobi	Wakatobi
15	RB. Luwuk Banggai	Luwuk Banggai
16	RB. Mamuju Utara	Mamuju Utara

$$x_{kp} = \left\{ \frac{\sum a + \sum b}{\sum c} \right\} \times 100\%$$

4. FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	:	Keterangan: XKP = Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP a = Jumlah Sarana Pengawasan yang selesai dirawat b = Jumlah Prasarana Pengawasan yang selesai dirawat c = Target Sarana dan Prasarana Pengawasan yang selesai dirawat
5. SATUAN INDIKATOR	:	%
6. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
7. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input <input type="checkbox"/> Lead Process <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Outcome
8. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung, Subkoordinator Sarana dan Prasarana
9. SUMBER DATA	:	Daftar Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Hasil Perawatan Kapal Pengawas, Data Sistem Informasi Riwayat Perbaikan Kapal Pengawas (SIRIKA)
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize

14. PERIODE PELAPORAN

: Bulanan

Triwulanan

Semesteran

Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan</p> <p>Dalam Hal pencapaian target kinerja pada setiap Triwulan dianggap tercapai sesuai target jika tidak ada penanganan TPKP, karena penanganan TPKP bersifat kasuistik dimana pelaksanaannya tidak dapat diprediksi.</p> <p>Hasil rata-rata Persentase seluruh perkembangan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut</p> $\tilde{x} = \sum_n^a \left(\frac{a_1+a_2+a_3\dots+a_n}{n} \right) x 100\%$ <p>\tilde{x} = Rata-rata persentase perkembangan penyidikan TPKP a = Persentase perkembangan kasus dimulai dari Gelar Perkara Awal Hingga Penyerahan Tahap II</p>

dimana nilai a didapat dari persentase perkembangan berdasarkan tabel berikut :

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTASE PERKEMBANGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI	KETERANGAN
Administrasi Penyidikan				
1	Gelar Perkara Awal	5	1. Undangan 2. Hasil Gelar Perkara	
2	Penerbitan SPRINDIK	30	Surat Perintah Penyidik	Faktor internal berpengaruh besar terhadap tahapan Penyidikan
3	Penerbitan dan Pengiriman SPDP Kepada Kejaksaan Negeri	15	Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	
Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka				
4	Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka dan Penyusunan Resume	30	Resume dan sampul berkas perkara (terdapat nomor berkas perkara)	Perhitungan secara akumulatif harus dipenuhi seluruhnya untuk mencapai target (Dikecualikan untuk Pemeriksaan Ahli, yg mana jika tidak ada Pemeriksaan Ahli pada saat penanganan perkara, maka pemeriksaan Ahli tidak menjadi nilai

				akumulatif)
5	Pengiriman berkas kepada Kejaksaan dan/atau Perbaikan Berkas Perkara	15	1. Surat Pengantar Penyampaian Berkas Perkara. 2. Tanda terima Penyerahan Tahap I dan BA serah terima berkas perkara.	Perbaikan berkas perkara dilakukan jika ada P-19
6	P-21	3	Surat P – 21 dari Kejaksaan Negeri	Dominan Pihak JPU
7	Tahap II	2	Berita Acara Tahap II	
JUMLAH		100		

4. SATUAN INDIKATOR	:	Persentase
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	() Lead Input () Lead Process (√) Lag Output () Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung, Subkoordinator Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
8. SUMBER DATA	:	Kelompok Penyidikan dan UPT Lingkup DJPSDKP, berupa dokumen : (1) Undangan Gelar Perkara Awal;

- (2) Laporan Hasil Gelar Perkara;
- (3) Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK);
- (4) Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- (5) Resume dan Sampul Berkas Perkara;
- (6) Tanda Terima/BA Tahap I berkas perkara;
- (7) Surat P-21;
- (8) BA Tahap II

9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 9 Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan Barang Bukti pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan</p> <p>Dalam Hal pencapaian target kinerja pada setiap Triwulan dianggap tercapai sesuai target jika tidak ada penanganan TPKP, karena penanganan TPKP bersifat kasuistik dimana pelaksanaannya tidak dapat diprediksi.</p> <p>Persentase penyelesaian penanganan barang bukti pidana kelautan dan perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut:</p> $\bar{x}_b = \sum_{i=1}^n \left(\frac{b_i + \dots + b_n}{n} \right)$ <p>\bar{x}_b = Rata-rata persentase penanganan barang bukti b = Persentase perkembangan penanganan seperangkat barang bukti dalam pembuktian satu perkara tindak pidana kelautan dan perikanan atau lebih yang berkaitan, sejak barang bukti tersebut disita sampai dengan diserahkan kepada penuntut umum (P-21 Tahap II) n = Jumlah set barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani</p> <p>Nilai b sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari persentase tahapan penyelesaian penanganan barang bukti sebagaimana tabel berikut:</p>

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTA SE TAHAPAN (%)	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KET.
1	Penyitaan Barang Bukti TPKP	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Sita dari Atasan PPNS 2. Berita Acara Sita oleh PPNS 3. Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan dari atasan PPNS kepada Ketua PN 4. Dokumentasi Barang Bukti 	
2	Penempatan atau Penyimpanan Barang Bukti TPKP di tempat yang memadai dan pemberian identitas barang bukti	40	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian label barang bukti TPKP 2. Dokumentasi 	Pemberian label pada setiap jenis Barang
3	Perawatan dan Pengamanan barang bukti sampai berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan, proses penyidikan dihentikan (SP3) atau penitipan barang bukti ke RUPBASAN atau tempat lain yang memadai	45	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Data Kondisi Fisik Barang Bukti TPKP 2. Laporan absensi penjagaan dan perawatan barang bukti TPKP 3. Surat pengantar penyerahan berkas perkara (Tahap I) kepada kejaksaan atau dokumen Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atau BA Penitipan ke RUPBASAN atau tempat Lain 4. Dokumentasi kegiatan perawatan dan penanganan barang bukti TPKP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dukung untuk barang bukti TPKP yang di tangani atau menjadi tanggung jawab Ditjen PSDKP. 2. Data dukung pada point 3 bersifat alternatif

	4	Penyerahan Tahap II	3	Surat pengantar penyerahan barang bukti TPKP (Tahap II)	
			2	BA serah terima barang bukti TPKP (Tahap II)	
	JUMLAH		100		

4. SATUAN INDIKATOR	:	Persentase			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung, Subkoordinator Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran			
8. SUMBER DATA	:	Data Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal, berupa dokumen : (1) Berita Acara Barang Bukti dan Dokumentasi; (2) Dokumentasi Foto dan Pemasangan Label; (3) BA/Tanda Terima Penyerahan Berkas Perkara Kepada Kejaksaan atau Surat Penghentian Penyidikan (SP3); (4) Surat Pernyataan P-21 dari Kejaksaan Negeri; (5) Berita Acara serah terima tersangka dan barang bukti (Tahap II) untuk barang bukti.			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru

12. POLARISASI : Maximize Minimize Stabilize

13. PERIODE PELAPORAN : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

INDIKATOR KINERJA 10 Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : 70 /DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan</p> <p>Dalam Hal pencapaian target kinerja pada setiap Triwulan dianggap tercapai sesuai target jika tidak ada penanganan TPKP, karena penanganan TPKP bersifat kasuistik dimana pelaksanaannya tidak dapat diprediksi.</p> <p>Persentase penyelesaian penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut:</p> $\bar{x}_a = \sum_{i=1}^n \left(\frac{a_i + \dots + a_n}{n} \right)$ <p>\bar{x}_a = Rata-rata persentase penanganan awak kapal a = Rata – rata persentase perkembangan penanganan awak kapal TPKP dari seluruh awak kapal TPKP (tersangka dan saksi) perkasus :</p> $\frac{Pakp}{nakp}$ <p>Pakp = Jumlah persentase perkembangan awak kapal TPKP (tersangka dan saksi) nakp = Jumlah tersangka dan saksi per kasus</p>

I = kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani

n = jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani

Nilai a sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari persentase tahapan penyelesaian penanganan awak kapal sebagaimana tabel berikut:

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTA SE TAHAPAN (%)	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KET.
1	Penyerahan Awak Kapal/Tersangka /Bukan Tersangka setelah dilakukan ekspose perkara yang menyatakan kasus dilanjutkan ke tingkat penyidikan	10	BAST Awak Kapal/ Tersangka/ Bukan Tersangka dari Penangkap kepada Unit Kerja yang menerima	<ol style="list-style-type: none">1. Awak Kapal yaitu orang yang termasuk dalam kategori tersangka atau bukan tersangka (saksi atau bukan saksi).2. Tersangka dapat berasal dari awak kapal dan bukan awak kapal TPKP.3. Bukan tersangka yaitu orang yang berasal dari kapal perikanan yang ditangkap dan termasuk dalam kategori saksi dan bukan saksi.
2	Pendataan dan Penampungan awak kapal/Tersangka/Bukan Tersangka di tempat yang memadai	40	<ol style="list-style-type: none">1. Data Identitas Awak Kapal/ Tersangka/ Bukan Tersangka2. Dokumentasi	

3	Merawat dan mengamankan awak kapal/Tersangka/Bukan Tersangka sampai dengan berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan atau proses penyidikan dihentikan (SP3) atau tersangka dititipkan ke Rutan atau dipulangkan ke kampung halaman atau diserahkan ke Kantor Imigrasi/RUDENIM	45	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Kondisi Fisik Awak Kapal TPKP 2. Absensi penjagaan awak kapal TPKP 3. Surat pengantar penyerahan berkas perkara (Tahap I) kepada kejaksaan atau dokumen proses penyidikan dihentikan (SP3) atau BA penitipan tersangka ke Rutan atau BA pemulangan ke kampung halaman atau BA penyerahan ke Kantor Imigrasi/RUDENIM 4. Dokumentasi kegiatan merawat dan mengamankan awak kapal /tersangka/bukan tersangka TPKP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dukung untuk awak kapal /tersangka/bukan tersangka TPKP yang ditangani atau menjadi tanggung jawab Ditjen. PSDKP 2. Data dukung pada point 3 bersifat alternatif
4	Penyerahan Tahap II atau penyerahan awak kapal bukan tersangka Warga Negara Asing (WNA) ke kantor Imigrasi/RUDENIM atau Pemulangan awak kapal bukan tersangka Warga Negara Indonesia (WNI) ke daerah asal.	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap II); atau 2. Berita Acara serah terima ke kantor Imigrasi / RUDENIM untuk awak kapal WNA bukan tersangka; atau 3. Berita Acara pemulangan awak kapal bukan tersangka WNI 	Alternatif
JUMLAH		100		

4. SATUAN INDIKATOR	:	Persentase			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung, Subkoordinator Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran			
8. SUMBER DATA	:	<p>Data Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal, berupa dokumen :</p> <p>(1) BAST Awak Kapal/ Tersangka/ Bukan Tersangka dari Penangkap kepada Unit Kerja yang menerima;</p> <p>(2) Dokumentasi Foto dan Data Identitas Awak Kapal/ Tersangka/ Bukan Tersangka;</p> <p>(3) Data Kondisi Fisik Awak Kapal TPKP;</p> <p>(4) Absensi penjagaan awak kapal TPKP;</p> <p>(5) Surat pengantar penyerahan berkas perkara (Tahap I) kepada kejaksaan atau dokumen proses penyidikan dihentikan (SP3) atau BA penitipan tersangka ke Rutan atau BA pemulangan ke kampung halaman atau BA penyerahan ke Kantor Imigrasi/RUDENIM;</p> <p>(6) Dokumentasi kegiatan merawat dan mengamankan awak kapal /tersangka/bukan tersangka TPKP;</p> <p>(7) Berita Acara serah terima ke kantor Imigrasi/RUDENIM untuk awak kapal WNA bukan tersangka; atau Berita Acara pemulangan awak kapal bukan tersangka WNI</p>			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru

12. POLARISASI : Maximize Minimize Stabilize

13. PERIODE PELAPORAN : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

INDIKATOR KINERJA 11 Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan			
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Bitung			
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Efektivitas pengenaan sanksi administratif merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan			
		$P = \frac{c}{ab} \times 100 \%$			
		P = Persentase Efektivitas pengenaan sanksi administratif			
		ab = Jumlah rekomendasi pengenaan sanksi administrasi yg tertuang dalam laporan Hasil Analisis Pusat Pemantauan Kapal Perikanan/hasil pengawasan dari pengwas perikanan/polsus PWP3K.			
		c = Jumlah Pelanggaran dan Sanksi Administratif yang sudah ditindak lanjuti			
4. SATUAN INDIKATOR	:	Persentase			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	() Kuantitas/ Output	(√) Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	() Lead Input	() Lead Process	(√) Lag Output	() Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung			
8. SUMBER DATA	:	Subkooor Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran			
9. STATUS DATA	:	() Raw Data	(√) Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(√) Nilai Posisi Akhir	

DATA

11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 12 Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT DJPSDKP
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT DJPSDKP dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan Forum Koordinasi masing – masing daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.18/MEN/2011 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Hasil rata-rata koordinasi penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$a = \frac{\sum a}{\sum b}$$

a = Nilai Efektifitas forum koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan diperoleh dari jumlah responden pengisian kuisioner oleh peserta forum yang dikonversikan menjadi persentase;

$\sum a$ = Jumlah peserta yang diberikan kuisioner yang relevansi terhadap materi forum koordinasi tindak pidana perikanan tingkat daerah;

$\sum b$ = Jumlah peserta yang hadir sebanyak 80 % dari total peserta yang masuk dalam SK Forum Koordinasi masing – masing daerah.

4. SATUAN INDIKATOR	:	Persentase
----------------------------	---	------------

5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input type="checkbox"/> Lag Output	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung			
8. SUMBER DATA	:	Subkooor Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pangkalan PSDKP Bitung			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 13 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan
Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Pangkalan PSDKP Bitung adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung;</p> <p>b. Pelayanan publik yang dilaksanakan adalah untuk Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan.</p> <p>c. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan sebanyak empat kali dalam satu tahun yakni pada setiap triwulan.</p> <p>Penghitungan IKM pelayanan SLO yang dilakukan dengan metode survey oleh Pangkalan PSDKP Bitung sesuai dengan peraturan Permenpan no 14 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:</p> $x_{ikm} = x_1$ <p>x_{ikm} : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung</p> <p>x_1 : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO</p>
4. SATUAN INDIKATOR	:	indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

PADA SKP					
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input type="checkbox"/> Lag Output	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung, Subbagian Tata Usaha			
8. SUMBER DATA	:	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO di UPT Pangkalan PSDKP Bitung			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 14 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Penangkapan Ikan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks))

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Penangkapan Ikan) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Pangkalan PSDKP Bitung adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung; 2. Pelayanan publik yang dilaksanakan adalah untuk Penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan (LVHPI) pada Pangkalan PSDKP Bitung 3. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan sebanyak empat kali dalam satu tahun yakni pada setiap triwulan <p>Penghitungan IKM pelayanan LVHPI yang dilakukan dengan metode survey oleh Pangkalan PSDKP Bitung sesuai dengan peraturan Permenpan no 14 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:</p> $x_{ikm} = x_1$ <p>x_{ikm} : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI lingkup Pangkalan PSDKP Bitung</p> <p>x_1 : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI</p>
4. SATUAN INDIKATOR	:	indeks
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	() Kuantitas/ Output (<input checked="" type="checkbox"/>) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input type="checkbox"/> Lag Output	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung, Subbagian Tata Usaha			
8. SUMBER DATA	:	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI di UPT Pangkalan PSDKP Bitung			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 15 Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.4. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	() Kuantitas/ Output (<input checked="" type="checkbox"/>) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	() Lead Input () Lead Process (<input checked="" type="checkbox"/>) Lag Output () Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT Pangkalan PSDKP Bitung

8. SUMBER DATA	:	Penilaian Tim Auditor Inspektorat Jenderal			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16 Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya;• Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:• Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)• Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:• Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)• Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)• Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)• Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)

- b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)
- c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)
- d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)
- e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)
- Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
 - b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
 - c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2
 - d. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1

- ASN Struktural :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Fungsional :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat Fungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Staf :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)

4. SATUAN INDIKATOR	:	indeks			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	(<input type="checkbox"/>) Kuantitas/ Output	(<input checked="" type="checkbox"/>) Kualitas/ Mutu	(<input type="checkbox"/>) Waktu	(<input type="checkbox"/>) Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	(<input type="checkbox"/>) Lead Input	(<input type="checkbox"/>) Lead Process	(<input checked="" type="checkbox"/>) Lag Output	(<input type="checkbox"/>) Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung			
8. SUMBER DATA	:	Aplikasi SIMPEG Online KKP; Aplikasi E-SKP			
9. STATUS DATA	:	(<input type="checkbox"/>) Raw Data	(<input checked="" type="checkbox"/>) Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	(<input type="checkbox"/>) Akumulasi	(<input type="checkbox"/>) Rata-rata	(<input checked="" type="checkbox"/>) Nilai Posisi Akhir	

11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 17 Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">a. Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasib. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebetuk verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerjac. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek:<ul style="list-style-type: none">• Aspek kepatuhan: dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja• Aspek kesesuaian: dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan• Aspek ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)• Aspek Ketepatan : dinilai berdasarkan penyampaian LKJ tahunan pada aplikasi ESR (tanggal upload pada aplikasi ESR dibandingkan dengan tanggal batas sesuai ND Karoren) dan penyampaian kepada atasan (tanggal Memo/surat pengantar penyampaian LKJ ke atasan dibandingkan dengan tanggal batas pada PermenKP 68/2017)

CARA PENGUKURAN CAPAIAN

SKORREKON=Nilai kepatuhan+Nilai kesesuaian+Nilai ketercapaian

Nilai Kepatuhan:

Nilai kepatuhan=25% x Dokumen yang ada Total dokumen yang dibutuhkan x 100

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Perjanjian Kinerja
2. Manual IKU/Informasi Indikator Kinerja
3. Rincian Target IKU
4. Rencana Aksi
5. LKJ/LCK
6. Data Dukung LKJ/LCK

Nilai Kesesuaian:

$\text{Nilai kesesuaian} = 25\% \times \text{Nilai kriteria dokumen yang disandingkan} / \text{Total dokumen yang disandingkan}$

Kriteria dokumen yang disandingkan:

Target:

- A. PK – LKJ/LCK
- B. LKJ/LCK – Kinerja
- C. PK – Kinerja

Realisasi:

- A. LKJ/LCK TW I – Kinerja
- B. LKJ/LCK TW II – Kinerja
- C. LKJ/LCK TW III – Kinerja

Informasi data:

- A. Manual IKU – Kinerja
- B. Rincian Target – Kinerja

Nilai Ketercapaian:

$\text{Nilai ketercapaian} = 30\% \times \text{Rata-rata NPSS triwulanan} / 120 \times 100$

Nilai Ketepatan :

Dilihat berdasarkan penyampaian LKJ tahunan pada aplikasi ESR (tanggal upload pada aplikasi ESR dibandingkan dengan tanggal batas sesuai ND Karoren) dan penyampaian kepada atasan (tanggal Memo/surat pengantar penyampaian LKJ ke atasan dibandingkan dengan tanggal batas pada PermenKP 68/2017)

Kriteria penilaian	Nilai
Penyampaian tepat waktu / kurang dari target	100
Penyampaian telat 1 hari	90
Penyampaian telat 2 hari	80
Penyampaian telat 3 hari	70

Penyampaian telat >3 hari	10
tidak menyampaikan	0

4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input <input type="checkbox"/> Lead Process <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung
8. SUMBER DATA	:	Hasil Pengukuran mandiri lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dan reuiu Sedit PSDKP
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP			
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja			
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen PSDKP dengan target 21 per triwulan, yang diperoleh dari : <ul style="list-style-type: none">• Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung• Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Bitung, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja			
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input type="checkbox"/> Lag Output	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung			
8. SUMBER DATA	:	Hasil Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker UPT Pangkalan PSDKP Bitung			
9. STATUS DATA	:	<input checked="" type="checkbox"/> Raw Data		<input type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru

12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 19 Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutanKelompok inovasi: umum, replikasi, khusus <p>Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi;selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan; telah diimplementasikan paling singkat 2 tahun bagi kelompok umum dan khusus serta telah diimplementasikan 1 tahun bagi kelompok replikasi. Usia implementasi dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran KIPP sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasidengan melampirkan bukti valid yang menunjukkan informasi tersebut.</p> <p>Formula pengukuran: Dihitung dari jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi tingkat Ditjen. PSDKP (mengacu pada Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 161 Tahun 2016)</p>
4. SATUAN INDIKATOR	:	Unit
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	(√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input type="checkbox"/> Lag Output	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung			
8. SUMBER DATA	:	Pangkalan PSDKP Bitung			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 20_Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP			
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung			
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
		Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%); 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%); 4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).			
4. SATUAN INDIKATOR	:	%			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	() Kuantitas/ Output	(√) Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	() Lead Input	() Lead Process	(√) Lag Output	() Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung			
8. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP			

9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 21 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP			
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung			
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
		<p>Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV</p> <p>Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%). 			
4. SATUAN INDIKATOR	:	%			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung			
8. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP Nomor 1031/ITJ.0/RC.610/IX/2021 tanggal 13 September 2021 perihal pedoman pengukuran indikator kinerja Tingkat Kepatuhan PBJ dan BMN Eselon I Lingkup KKP Tahun 2021			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	

**PERHITUNGAN
DATA**

11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
---------------------------------	---	--	---	--	--

12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
-----------------------	---	--	-----------------------------------	------------------------------------

13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
----------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

**INDIKATOR KINERJA 22 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)**

1. SASARAN KEGIATAN	: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	: Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. • Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja; ○ Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV); ○ Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • UKURAN : Komponen Pembentuk dari unit kerja eselon II. Yang dinilai, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2) b. Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix) c. Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H); • CARA MENGUKUR : <ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan Aplikasi Bitrix b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan c. Pengukuran dokumen: <ol style="list-style-type: none"> a. Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahun b. Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulan c. Renaksi Kinerja d. Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan e. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 1 kali upload informasi.

- f. Untuk konten video diharapkan **bersifat edukasi atau ajakan**, yang **di upload minimal satu kali dalam triwulan**.
- g. Rekonsiliasi realisasi dengan **mengundang penanggung jawab eselon I dilakukan setiap triwulan**.
- h. Pengukuran level 1 dihitung dengan **lingkup pejabat pusat**.
- i. **Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif** pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.
- j. Hasil capaian pada akhir tahun merupakan **nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV**.

4. SATUAN INDIKATOR	:	%			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung			
8. SUMBER DATA	:	bitrix24.com			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 23 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

1. SASARAN KEGIATAN	: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP			
2. INDIKATOR KINERJA	: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan			
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	: Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2021 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2022 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.			
	Σ N : Jumlah dokumen hasil rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP			
4. SATUAN INDIKATOR	: %			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	: () Kuantitas/ Output	(<input checked="" type="checkbox"/>) Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	: () Lead Input	(<input checked="" type="checkbox"/>) Lead Process	() Lag Output	() Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	: Pangkalan PSDKP Bitung			
8. SUMBER DATA	: <ul style="list-style-type: none"> • Itjen KKP (Inspektorat I-V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) • Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung 			
9. STATUS DATA	: () Raw Data		(<input checked="" type="checkbox"/>) Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	: () Akumulasi		(<input checked="" type="checkbox"/>) Rata-rata	() Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	: () Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	(<input checked="" type="checkbox"/>) Non Direct/Buat Baru

12. POLARISASI : Maximize Minimize Stabilize

13. PERIODE PELAPORAN : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

INDIKATOR KINERJA 24 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)

1. SASARAN KEGIATAN

: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

2. INDIKATOR KINERJA

: **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA

: Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Target IKPA Tahun 2022 sebesar 89.00 (nilai)

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU IKPA

- a. Pengukuran Capaian IKU IKPA dilakukan pada semester I dan II
- b. Penarikan Data Capaian IKPA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan langkah-langkah akhir tahun berjalan yang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA = $\sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}$

4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung			
8. SUMBER DATA	:	Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan (pada menu Monev PA)			
9. STATUS DATA	:	<input checked="" type="checkbox"/> Raw Data	<input type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> <i>Non Direct</i> /Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

1. SASARAN KEGIATAN : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

2. INDIKATOR KINERJA : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- • Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA
 1. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)
 2. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan
- Target NKA Level I Tahun 2022 sebesar 86.00 (nilai)
Target NKA Level II Tahun 2022 sebesar 81.00 (nilai)
Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain
 - a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
 - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;

- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Formula Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$$

Keterangan :

- NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi
- P : penyerapan anggaran
- K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- COP : capaian output program
- CRO : capaian ro
- NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja
- W_p : bobot penyerapan anggaran
- W_k : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan
- W_{COP} : bobot capaian Output Program
- W_{CRO} : bobot capaian RO

Perhitungan NK Satker		
Indikator		Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %
	Efisiensi	28,6 %
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %
	Penyerapan Anggaran	9,7 %
Nilai Kinerja Satker		Total

Formulasi Aspek Manfaat

$$CSP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{i=1}^m \left(\prod_{j=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

Keterangan:

CSP : Capaian Sasaran Program tingkat unit eselon I

RIKP_i : Realisasi Indikator Kinerja Program i

TIKP_i : Target Indikator Kinerja Program i

l : Jumlah program dalam suatu unit eselon I

m : Jumlah Sasaran Program dalam setiap program

n : Jumlah Indikator Kinerja Program dalam setiap sasaran program

4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Outcome
7. UNIT KERJA/PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung			
8. SUMBER DATA	:	Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan			
9. STATUS DATA	:	<input checked="" type="checkbox"/> Raw Data	<input type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	

11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> <i>Non Direct/Buat Baru</i>
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan